

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar pertanian Indonesia dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relative kecil. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahunnya bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani untuk meningkatkan pendapatannya sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Masyarakat petani miskin selain luas lahan usahatannya yang sempit, juga disebabkan oleh produktivitas yang rendah, infrastruktur terbatas, aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, dan informasi pasar, serta rendahnya kapasitas petani (Anantanyu, 2011).

Pembangunan pertanian meliputi pembangunan dan peningkatan pada faktor-faktor : teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Usaha pertanian memiliki tiga kegiatan yaitu input, produksi dan output. Dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, proses produksi sampai dengan pengolahan hasil pertanian diperlukan kelembagaan pertanian. Pembangunan pertanian baik pada negara industri maupun negara berkembang seperti Indonesia, kelembagaan pertanian memiliki peranan penting. Akan tetapi pada kenyataannya memperlihatkan bahwa masih lemahnya kelembagaan pertanian di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani (Anantanyu *et al*, 2009). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Dimyati dalam Nasrul (2012) yaitu permasalahan yang melekat pada kelembagaan pertanian di Indonesia adalah peran dan fungsi kelembagaan pertanian (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) sebagai wadah organisasi belum berjalan secara optimal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunartomo (2016), kinerja penyuluh pertanian dalam rangka peningkatan produksi pertanian di Jawa Timur memiliki kategori sangat baik.

Salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dalam pembangunan pertanian adalah penyuluh pertanian. Kelembagaan penyuluh pertanian sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan tercapainya tujuan dari pembangunan pertanian.

Kelembagaan penyuluhan dibutuhkan sebagai wadah dalam proses pelaksanaan penyuluhan. Sistem penyuluhan yang dulunya terdiri dari subsistem petani, penyuluh dan kelembagaan struktural berubah menjadi subsistem petani, penyuluh, pelaku agribisnis lainnya, lembaga penelitian, pendidikan dan lembaga pelatihan. Salah satu mata rantai lembaga penyuluhan yang dekat dengan masyarakat dan berada di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (Lesmana, 2007). Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2018), Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten dengan luas lahan terbesar di Sumatera Utara. Produksi padi sawah lima tahun terakhir di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, produksi padi sawah di Kabupaten Simalungun mencapai 449.779 ton, pada tahun 2014 sebesar 526.331 ton, pada tahun 2015 sebesar 535.804 ton, pada tahun 2016 sebesar 634.527 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 447.135 ton. Kabupaten Simalungun memiliki tenaga penyuluh pertanian PNS sebanyak 47 orang dan Non PNS sebanyak 148 orang, kelompok tani (Poktan) sebanyak 4.628, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebanyak 332. Penyuluh pertanian tersebut tersebar di 31 Kecamatan, salah satunya di Kecamatan Panombeian Panei. Kecamatan Panombeian Panei memiliki 3 orang penyuluh PNS dan 3 orang Non PNS, kelompok tani sebanyak 147 dan gapoktan sebanyak 7 gapoktan yang tersebar di 11 nagori atau desa (BPS Simalungun, 2018).

Menurut Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 72/Permentan/Ot.140/10/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian menyatakan bahwa penempatan penyuluh Pertanian di desa/kelurahan ditetapkan sebagai berikut: a) apabila dalam satu desa terdapat lebih besar atau sama dengan delapan poktan, maka ditempatkan 1 (satu) orang penyuluh; b) apabila dalam satu desa terdapat kurang dari delapan poktan, maka ditempatkan satu penyuluh untuk membina dua desa. Dengan adanya peraturan ini memungkinkan terjadinya variasi pelayanan para penyuluh. Hal ini disebabkan lingkungan geografis, keberagaman kemampuan penyuluh dan petani, serta keberadaan sarana dan prasarana (Arifin, 2015). Apabila ditinjau dari peraturan tersebut, jelas saja tenaga penyuluh yang ada di Kecamatan Panombeian Panei yang terdiri atas 11 desa dan 147 poktan tidak sesuai. Hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik

meneliti tentang persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian pada kegiatan sekolah lapang di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun ?
2. Faktor-faktor apa yang saja yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian pada kegiatan sekolah lapang di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian pada kegiatan sekolah lapang di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang disebutkan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penyuluh, sebagai bahan evaluasi bagi penyuluh agar lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan kegiatan penyuluhan.
2. Bagi petani, mengetahui bahwa ada penyuluh yang sebenarnya bisa membantu para petani dan memberikan ilmu bagi para petani.
3. Bagi Penulis, memberikan wawasan dalam menganalisis persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian.
4. Bagi Pembaca, memberikan tambahan informasi atau sebagai bahan acuan dalam penelitian tentang persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian.